

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Dimana prostitusi ini sering kali dijadikan ladang penghasilan tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Oleh sebab itulah bisnis ini menjanjikan mudah dilakukan. Fenomena ini pun telah terjadi sejak zaman dahulu diseluruh di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan (koesoemo dkk, 2023).

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan cyber untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara online. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktek prostitusi yang dilakukan secara daring. Uang dan seks adalah dua faktor yang selalu di incar oleh manusia. Di zaman ini seks menjadi industri bisnis yang sangat besar dan sudah sangat dikenal masyarakat. Walaupun masih merupakan kontroversi dan bisnis yang terlarang di banyak negara di dunia dalam konteks ini, sangat terlihat jelas bahwa internet memiliki dampak yang begitu besar ketika seseorang menjadi pelaku cyber porn (pornografi yang dimuat secara digital) ataupun prostitusi online maka ditarik kesimpulan bahwa orang tersebut memiliki ketergantungan tentang sesuatu hal yang berbau pornografi. Di Indonesia, kasus ini menjerat sekian banyak anak-anak remaja sebagai objek dan orang dewasa berperan sebagai mucikari (perantara/pemilik para PSK) bahkan selebrity tanah airpun tidak luput dari kasus ini (koesoemo dkk, 2023).

Kota Ternate dikenal sebagai kota budaya, Ternate masih mempertahankan sistem kesultanan dan juga menerapkan sistem pemerintahan membuat Ternate menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sangat ingin

diketahui orang terkait kondisi sosial masyarakat kota Ternate. Memiliki dua pemegang kebijakan membuat keputusan-keputusan yang di peruntukkan demi pembangunan. Makna pembangunan tidak dapat di pisahkan baik dari satu daerah maupun masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Daerah yang dikatakan bergerak kearah maju tidak luput dari masyarakat yang bergerak maju begitupun sebaliknya masyarakat yang termodernisasi hadir pasti akan mempengaruhi perkembangan daerah yang didiaminya. Demikian pula yang terjadi di Ternate, modernisasi hadir dengan membuat pemerintah masyarakat cemas akan dampak buruk yang terjadi apabila modernisasi tidak berjalan seimbang penanaman nilai-nilai lokal di kalangan pemuda Ternate. Ternate saat ini banyak dijumpai pemuda-pemudi bertingkah dan berperenampilan modern tetapi kurang bahkan tidak memahami budaya setempat akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi (Jamaludin, 2016).

Peraturan daerah (perda) Nomor 57 tahun 2007 tentang larangan praktik prostitusi di kota Ternate, Maluku Utara tampaknya tidak jalan. Ini terbukti dengan masih maraknya praktik prostitusi di daerah ini.”praktik prostitusi di Ternate semakin tumbuh subur, ini berarti pihak-pihak terkait di daerah ini belum melaksanakan amanat perda larangan praktik prostitusi tersebut,” kata anggota DPRD kota Ternate, Zainal di kota Ternate.

Jika perda tersebut terlaksanakan secara efektif, menurut dia, daerah tersebut akan terbebas dari praktik prostitusi karena sesuai perda itu pelaku prostitusi diancam dengan penjara enam bulan dan denda 50 juta. Ia mengatakan, tempat-tempat tertentu di kota Ternate, seperti dikawasan swering setiap malam diwarnai dengan keberadaan para pekerja seks komersial (PSK) terutama menjelang larut malam. Ironisnya para PSK tersebut, ada yang masih berusia belasan tahun, bahkan belakangan diketahui PSK yang berusia belasan tahun itu masih berstatus siswa di salah satu SMP di kota Ternate. “ kondisi tersebut tentu tidak bisa di biarkan, mengingat praktik prostitusi itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat, selain itu juga dapat menjadi salah satu sumber penyebaran virus HIV,” katanya.

Sesuai laporan Dinas kesehatan kota Ternate, di daerah ini sudah tercatat Sembilan orang yang terinfeksi virus HIV. Mereka itu diduga terinfeksi

melalui seks bebas (prostitusi). Kabag Humas dan protokoler Pemkot Ternate, Yunus yau mengatakan, Pemkot sudah berupaya menerapkan perda tersebut dengan cara terus mengintensifkan penertiban PSK di seluruh wilayah kota Ternate. Namun, belum berhasil membebaskan daerah ini dari praktik prostitusi.

Dalam rangka untuk menanggapi keluhan dan keresahan warga berkenaan dengan PSK, berdasarkan perda dan perwali kota Ternate, pemerintah melalui satuan polisi pamong praja (satpol PP) melakukan razia di beberapa tempat wilayah seputaran kota Ternate selama tahun 2022. Data jumlah psk selama razia tercantum dalam tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel 1

Data Pelacuran Dalam Wilayah Kota Ternate tahun 2020, s/d 2023

BULAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
	2020	2021	2022	2023
Januari	30	-	-	-
Februari	11	10	20	-
Maret	-	-	15	4
April	8	-	10	-
Mei	5	35	-	-
Juni	10	20	22	21
Juli	-	-	11	10
Agustus	-	25	-	14
September	-	4	-	39
Oktober	10	-	-	11
November	3	-	18	30
Desember	-	5	23	-
TOTAL	77	99	119	129

Sumber: Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2020 s/d 2023

Dari data tabel 1.1. Di atas dapat di lihat bahwa jumlah prostitusi di kota Ternate dapat meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 PSK berjumlah 77 orang, di tahun 2021 berjumlah 99 orang, ditahun 2022 berjumlah 119 dan di tahun 2023 berjumlah 129. Data ini di dapatkan dari hasil Razia Satuan Pamong Praja.

Migrasi atau perpindahan penduduk merupakan salah satu masalah kependudukan sebagai akibat dari hubungan timbal balik antara penduduk dan lingkungannya. Jika penduduk bertambah, sedangkan lingkungan atau tempat tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk, maka jalan keluarnya adalah bermigrasi dengan bermigrasi penduduk beranggapan bahwa kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara asal lebih lanjut, tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi di daerah tujuan. Faktor-faktor positif (daya Tarik) disuatu daerah seperti terdapatnya peluang usaha, luasnya kesempatan kerja, lebih tinggi upahnya, terdapat fasilitas sosial yang gratis atau murah, terdapat eksternalitas ekonomi yang lebih menguntungkan, cenderung mendorong orang bermigrasi keluar, apalagi di daerah asal terdapat faktor negatif seperti tidak ada peluang usaha dan kesempatan kerja, upah rendah, biaya tinggi dan pajak tinggi (Syahrain, 2019).

Menurut Guritno Mankoesoebroto (Sarjono, 2009) eksternalitas timbul dari kegiatan konsumsi atau produksi dari suatu pihak yang mana memiliki pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan dampak tersebut. Sedangkan menurut D.J.A. Simarmata, eksternalitas ekonomi merupakan sebuah kejadian yang menimbulkan keuntungan bagi seseorang atau beberapa yang tidak sepenuhnya merupakan peserta pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung dan memungkinkan kejadian yang bersangkutan data terjadi. Eksternalitas ekonomi akan timbul dari tindakan konsumsi atau produksi dan bersifat positif dan negatif. Dilihat dari dampak bagi masyarakat: eksternalitas positif, yang mana dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang menguntungkan, sedangkan eksternalitas negatif ialah dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak tanpa kompensasi dari pihak yang dirugikan (Aini, 2020).

Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi karena dalam pendidikan dari usia dini sudah diajarkan moralitas untuk menuntun kehidupan yang taat dan santun sebagai warga negara. Aspek

kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita karena disini mereka dibayar untuk menemani atau memuaskan nafsu seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan. Aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja yang dimana para pelacur yang dipaksa oleh mucikari untuk melayani klien tanpa mendapatkan bayaran. Aspek kamtibmas, prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan. Segi medis pun tindakan tersebut membawa efek samping yang secara tidak langsung di terima oleh para pelaku prostitusi yaitu penyakit menular HIV/AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan para pelanggan yang memakai jasa mereka. Karena itulah sangatlah diperlukan tindakan-tindakan pencegahan dan para pemberantasan untuk menghindari semakin maraknya kasus prostitusi online ini. bahkan dapat menyerang mental serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat yang berujung *bullying* dan bahkan mengakibatkan adanya tindakan bunuh diri. Dampak lainnya dari praktek prostitusi adalah adanya tindakan kriminal lain yang menyertai, seperti minum minuman keras, pengguna narkoba, dan tidak jarang pula terjadi pembunuhan (koesoemo dkk, 2023).

Prostitusi atau praktik pelacur merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Banyak kalangan berpendapat bahwa prostitusi ada sejak manusia ada dan terus berkembang sampai saat ini. Prostitusi berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacur sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan (sulistyaningsih & swasono. 1993: 3). Prostitusi saat ini menjadi telah menjadi fenomena sosial yang menjadi faktor pendukung marak hiburan dan kesenangan yang di tawarkan di beberapa kota termasuk di kota Surabaya. bahkan secara implisit oleh para pemburu kesenangan telah dijadikan salah satu *sex tourism*, karena mengingat prostitusi yang semakin waktu tidak pernah surut. Menurut Irwanto (2001: 32) ada sekitar 21.000 anak –anak yang dilacurkan di Indonesia untuk dijadikan pekerja seks, antara lain beroperasi di tempat-tempat yang terang-terangan dan di panti pijat, di tempat karaoke, bar, diskotik, dan di jalan-jalan (Moefad 2015).

Pelacur yang dilakukan oleh para PSK sendiri merupakan gejala sosial yang timbul ketika wanita menyediakan jasanya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencariannya. Pelacur merupakan masalah sosial terhadap perkembangan moral. Pelacur itu selalu ada pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum, selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan secara terorganisir maupun individu (Munawaroh, 2015 *dalam* Dinatri dkk 2020).

Di sisi lain, keberadaan PSK telah memunculkan keuntungan bagi masyarakat setempat, yaitu menimbulkan pekerja baru bagi masyarakat salah satunya munculnya peningkatan ekonomi bagi pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Sebagian warga masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan PSK tersebut memiliki pandangan positif terhadap PSK. Keberadaan PSK berdampak positif karena dapat meningkatkan perekonomian. Namun hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya PSK. Berbeda dengan masyarakat yang merasa dirugikan menganggap PSK berdampak negatif bagi lingkungan mereka karena berpotensi tinggi dalam menyebarkan penyakit HIV/AIDS serta peredaran narkoba (Maiti & Bidinger, 1981 *dalam* Dinatri dkk 2020).

Praktik dugaan prostitusi marak di kota Ternate, Maluku utara. Alih-alih pemerintah tidak menyediakan tempat lokalisasi, namun bisnis asek-asek ini berjalan massif dan terselubung. Salah satu kelurahan yang diduga terindikasi adanya praktik tersebut yakni Bastiong Talangame, kecamatan Ternate selatan. Sebagai indikator dinas kesehatan (dinkes) kota Ternate, Maluku utara, mencatat berdasarkan data tahun 2018, infeksi human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrom (HIV/AIDS) mencapai 410 orang. Lima golongan yang paling banyak mengidap virus menular ini adalah ibu rumah tangga (IRT) jumlahnya 72 orang. Selebihnya terdiri dari PNS 59, wiraswasta 57, tidak bekerja 40, dan karyawan swasta 40 orang. Satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota Ternate, Fandy Mahmud Thumina, kepala gatra.com di Ternate, Kamis (20/6), mengaku baru tahu jika praktek tersebut masih berjalan. "karena sejauh ini belum

kedapatan ketika petugas melakukan operasi” katanya. Secara terpisah, lurah Bastiong Talangame, Masdiana M. Syafar, mengaku sebelum Ramadan kemarin satpol pp setempat melakukan razia di seputaran pasar inpres bastiong. “karena memang dari dulu lokasi yang diduga sebagai sarang prostitusi di sekitar situ,” ungkapnya. Masdiana mengaku, paska razia sempat hilang, namun usai razia mereka kembali eksis saat larut malam padahal selain razia pihak kelurahan juga pihak kelurahan juga melibatkan ketua RT, polisi dan babinsa namun ketidak tegasan beberapa oknum ketua RT turut di akui Masdiana. “kita juga dilema” tandasnya. Menanggapi hal itu, kepala dinas sosial kota Ternate Muhdar Din, menegaskan masalah tersebut bukan hanya tanggung jawab dinsos. “beberapa institusi harus turun sama-sama harus di sinergikan dari seluruh lini,” ujarnya. Muhdar mengakui, dalam beberapa tahun belakang terjadi peningkatan HIV/AIDS di Ternate. Ia menduga, ini tidak terlepas dari pengaruh narkoba. “sebenarnya HIV/AIDS ada hubungan antara narkoba dan seks bebas juga memang dari beberapa pemberitaan yang saya ikuti belakangan ini kasus narkoba dan perilaku seks di Maluku utara meningkat,” ungkapnya. Muhdar katakan sejalan dengan visis-misi mewujudkan kota agamais, maka di Ternate tidak ada lokalisasi. Sebab, lokalisasi sama halnya melegalkan zina. Hanya saja, kata Muhdar praktek seks bebas tersebut mala menjadi lebih liar. “Jadi masalah ini harus disentuh sama-sama,” tandasnya.

PSK (pekerja seks komersial) merupakan istilah yang sering di tujukkan kepada wanita yang menyediakan jasanya bagi para laki-laki untuk melakukan hubungan seksual tanpa nikah dengan mendapatkan bayaran berupa uang atau benda berharga lainnya (Riswanda, mcIntyre-mills, & Corcoran-nantes, 2017). PSK dapat di artikan sebagai tidak susila atau menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila (Thorpe, Ford, Fajans, & wirawan, 1997). PSK adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan celaka dan penyakit, baik orang yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada dirinya sendiri. PSK adalah wanita yang kurang beradab karena keroyalen relaksi seksualnya, dan mendapatkan imbalan bagi pelayanannya (kartono, 2007 *dalam* Dinatri dkk 2020).

1.2. Motivasi Penelitian

Alasan penulis memilih judul “Trend Perkembangan Prostitusi dan Dampak Ekonomi PSK di Kota Ternate”, sebagai judul Proposal adalah karena permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas dan teliti. Selain itu juga, dijadikan bahan diskusi oleh semua kalangan masyarakat di Maluku Utara.

Disamping alasan tersebut, penulis juga memilih beberapa alasan lain yang dikemukakan di sini, yaitu :

1. Prostitusi merupakan pekerjaan seks terjadi sejak lama, sejauh mana dampak ekonomi terhadap pekerja seks di Kota Ternate. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal semacam ini untuk di teliti.
2. Maraknya prostitusi merupakan isu di Kota Ternate yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan, sejauhmana prostitusi berkembang di Kota Ternate. Hal ini juga, penulis tertarik untuk mempelajarinya secara teliti.

1.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pendapatan para pekerja seks di kota Ternate.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Trend Perkembangan Prostitusi dan Dampak Ekonomi PSK di Kota Ternate?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Trend Perkembangan Prostitusi dan Dampak Ekonomi PSK di Kota Ternate

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan PSK
2. Sebagai syarat menempuh sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sebagai tambahan pustaka dan rujukkan penelitian-penelitian berikutnya.
3. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah kota Ternate agar lebih cermat dan dinamis dalam menanggapi dan menindak lanjuti masalah PSK dikota Ternate.